

**PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TALAUD TAHUN 2013
(Studi Kasus di Kecamatan Kabaruan)¹**

Oleh : Binsar Sasondol²

ABSTRAK

Negara yang demokratis menjamin adanya partisipasi rakyat dalam politik. Partisipasi yang dikenal dengan partisipasi politik tersebut dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Salah satu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik yaitu partisipasi dalam pemungutan suara atau perilaku politik (Voting behavior). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Talaud tahun 2013 di Kecamatan Kabaruan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih atau masyarakat sangat bervariasi, ada yang menggunakan hak pilihnya itu berdasarkan hati nuraninya, ada juga ketika memilih dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, seperti politik uang, ras, kepemimpinan, rekan atau teman kerja, ataupun saudara. Tetapi faktor yang paling menonjol atau paling mempengaruhi adalah faktor politik uang, karena pemilih merasa mengambil atau menerima uang dari calon atau tim sukses itu lebih baik, dari pada tidak diperhatikan selama satu periode dan juga bisa menggantikan satu hari tidak bekerja karena pergi ketempat pemungutan suara (TPS).

Kata Kunci: *Perilaku, Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah*

ABSTRACT

Democratic countries guarantee people's participation in politics. Participation known as political partitioning is carried out to influence the political decision-making process. One of the political participation of the community to influence the political decision-making process is participation in voting or political behavior (Voting behavior). This study aims to determine the behavior of voters in the election of regents and deputy regents in 2013 in the District of Kabaruan, using qualitative research methods. Data collection in this study was conducted by observing interviews with informants, document studies, and analyzing this data during this research. The results show that voter or

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

community behavior is very varied, there are those who use their voting rights based on their conscience, there are also when choosing influenced by external factors, such as money politics, race, leadership, colleagues or work colleagues, or relatives. But the most prominent factor or the most influential is the factor of money politics, because voters feel that taking or receiving money from a candidate or success team is better, than not being paid attention to for one period and also replacing a day without working because they go to polling stations.

Keywords: Behavior, Voters, Election of Regional Heads

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah jalan lurus untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Bagi Indonesia khususnya pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu bukan lagi sekadar rutinitas politik dan aksesoris demokrasi. Namun seiring dengan era reformasi, pemilu telah menjadi agenda nasional yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis kenegaraan dan kebangsaan yang nyaris mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Presiden secara langsung ini juga berdampak dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang diamanatkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung sebagaimana proses pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 yang lalu, sehingga tingkat keterlibatan publik dalam proses politik kenegaraan semakin lengkap. Disamping itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini juga merupakan sebuah peluang untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel, akseptabel dan kapabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perilaku Pemilih

Negara yang demokratis menjamin adanya partisipasi rakyat dalam politik. Partisipasi yang dikenal dengan partisipasi politik tersebut dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Salah satu partisipasi politik yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik yaitu partisipasi didalam pemungutan suara atau perilaku Pemilih (voting behaviour).

Perilaku Pemilih ini menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson berada dalam tataran kegiatan Pemilih dimana perilaku Pemilih tersebut bersamaan dengan partisipasi rakyat dalam memberikan sumbangan bagi kampanye, ikut serta menjadi pelaksana pemilu dan ikut serta mencari dukungan bagi seorang kandidat.

Dalam tataran kegiatan Pemilih, perilaku Pemilih masyarakat memiliki tingkatan yang dimulai dari memberikan suara bagi partai politik tertentu. Tingkatan berikutnya adalah ikut serta menjadi pelaksana pemilu, diikuti dengan keikutsertaan mencari dukungan bagi seorang kandidat, selanjutnya adalah dengan memberikan sumbangan dana bagi partai politik tertentu.

Menurut Ramlan Surbakti perilaku Pemilih adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu Pemilih atau tidak Pemilih dalam pemilu. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perilaku Pemilih mencakup Pemilih dan juga tidak Pemilih, memberikan suara dan tidak memberikan suara (golongan putih/golput) dalam pemilu. Bila seseorang memutuskan untuk Pemilih salah satu partai politik, maka lebih lanjut perilaku Pemilih juga mencakup apa atau siapa yang akan dipilih oleh individu tersebut.

Menurut Rush dan Althoff sebagaimana dikutip oleh Afan Gaffar berpendapat bahwa perilaku Pemilih merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil dari masyarakat karena hal tersebut hanya menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Meskipun demikian perilaku Pemilih menjadi sebuah objek penelitian menarik bagi para ilmuwan sosial, termasuk perilaku Pemilih di Indonesia. Hal ini dikarenakan pluralitas yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu kemajemukan suku, agama, ideologi, aliran dan budaya politik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku Pemilih masyarakat terhadap pemilihan partai maupun calon anggota legislatif tertentu.

Menurut Afan Gaffar ternyata pola perilaku masyarakat pemilih di Indonesia cenderung tidak bersifat rasional dalam arti bahwa para pemilih di Indonesia menentukan pilihannya terhadap partai tertentu bukan semata-mata karena perhitungan rasional tentang manfaat yang akan mereka terima, namun cenderung didasarkan oleh faktor-faktor yang bersifat tradisional dan ikatan-ikatan emosional yang dibangun sebagai akibat internalisasi nilai yang mereka pilih dari suatu generasi kegenerasi sebelumnya. Maka konsep identifikasi kepartaian menjadi sangat relevan dalam memahami perilaku Pemilih masyarakat.

Dalam memahami perilaku Pemilih masyarakat, banyak pendekatan yang dapat dipakai. Menurut Afan Gaffar, perilaku Pemilih dinegara-negarademokrasi menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan sosio-psikologis.

Pertama, Pendekatan sosiologis. Model pendekatan ini berasal dari Eropa atau biasa disebut dengan mazhab Columbia. Model ini menjelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat tersusun secara hierarki. Perilaku Pemilih seseorang bisa dilihat melalui status seseorang itu berada. Dalam pendekatan sosiologis, pengelompokan sosial (seperti umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, dsb) dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku Pemilih.

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kecenderungan Pemilih terhadap salah satu partai/calon tertentu adalah hasil dari karakteristik sosio-ekonomi individu seperti ideologi, agama, kelas dan pekerjaan. Dilihat dari status, maka orang-orang kaya akan cenderung Pemilih partai-partai konservatif, karena mereka Pemilih amannya. Sebaliknya dari masyarakat bawah cenderung Pemilih partai yang menjanjikan perubahan, karena mereka juga ingin hidupnya berubah menjadi baik (sejahtera).

Kedua, Pendekatan psikologi. Pendekatan ini disebut juga sebagai mazhab Michigan. Pendekatan psikologis lebih melihat pada pengalaman individu terhadap calon/partai. Pengalaman individu tersebut tentunya terkait dengan agen sosialisasi politik seperti keluarga (orang tua maupun saudara), peer group, lembaga pendidikan (baik dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), media massa (baik media cetak maupun elektronik), teman kerja, partai-partai politik, memainkan peranan yang penting dalam membentuk sikap dan orientasi politik seseorang, karena agen-agen sosialisasi politik tersebut sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai politik.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, ada lima pendekatan dalam memahami perilaku Pemilih individu dalam menentukan pilihannya kepada salah satu calon/partai.

Pilkada

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Adapun khusus untuk daerah Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Pemilihan kepala daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri atas :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang yang mengatur tentang dasar Hukum Penyeleggaraan Ilkada adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Makna pilkada terbagi menjadi 3 makna, yakni:

1. Perspektif Tujuan. Pilkada dimaksudkan sebagai pemindahan konflik. Pemindahan dari masyarakat kepada perwakilan politik dengan tujuan menjamin integrasi masyarakat.
2. Perspektif Tingkat Perkembangan Negara. Pilkada diadakan sebagai alat untuk membenarkan rezim yang berkuasa.
3. Perspektif Demokrasi Liberal. Pilkada merupakan upaya meyakinkan serta melibatkan individu dalam setiap proses politik.

Manfaat pilkada:

1. Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat.
2. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan.
3. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya.
4. Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti.
5. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat.
6. Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya.

7. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Langsung, rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara.
2. Umum, asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial dan lain-lain.
3. Bebas, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya.
4. Rahasia, suara dari pemilih akan dijamin kerahasiannya.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, Baik penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang.
6. Adil. Setiap pemilu dan orang yang di pilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah mendekonstruksi kembali realitas politik yang sudah terjadi (*Past Factum*). Menurut Bahdin Nur Tanjung dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini akan mengambil lokasi (tempat) di Kabupaten Kepulauan Talaud Kecamatan Kabaruan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowballing*. Cara memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan *gatekeeper* yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu penulis selama penelitian ini sekaligus orang pertama yang diwawancarai, kemudian dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah didapat penulis. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 10 orang informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu. Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan dua cara yakni: Observasi dan Metode Wawancara. Informasi akan bersumber dari dua jenis data yang dikumpulkan: pertama, data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis (sekunder). Kedua, data yang diperoleh dengan sumber-sumber tidak tertulis atau data yang diperoleh dari sumber

informannya (primer). Analisis data yang digunakan untuk memahami tanggapan informan dalam menarik suatu pernyataan yang mendukung dari pemahaman atas keadaan sebenarnya, kemudian dibuatkan pembahasan dan penyimpulan atas data hasil penelitian yang dinyatakan dengan tulisan, kata-kata atau kalimat. Untuk menganalisa keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* yaitu, tehnik pemeriksaan data yang mementingkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Karena penelitian ini menggunakan *triangulasi* dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dealam metode kualitatif. Hasil analisa data diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penelitian di lapangan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara pada para informan, dari hasil penelitian dan wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Talaud tahun 2013 di kecamatan Kabaruan.

Kecamatan Kabaruan termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang selalu berintegrasi pada kegiatan di bidang pembangunan seperti desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun demikian sampai dengan saat penelitian ini dilakukan masih belum banyak perubahan yang berarti terutama di bidang politik dan pemerintahan. Tipikal wilayah ini masih tetap mengandalkan sekitar nelayan sebagai bumbu utama perekonomiannya, dan sangat paralel dengan karakteristik masyarakatnya yang bercorak paternalistik bahkan cenderung pada sikap yang statis. Akibatnya wilayah ini mengalami perkembangan yang lamban.

Sebagaimana kecenderungan umum bagi sebuah wilayah, Kecamatan Kecamatan Kabaruan termasuk Desa Kecamatan Kabaruan juga menghadirkan corak masyarakat yang homogen, baik dari aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya. Disamping itu juga kondisi ekonomi lemah bahkan masyarakatnya masih tergolong miskin. Dengan kondisi lokal seperti ini perilaku dalam menentukan sikap untuk memilih pemimpinnya nampak kurang mendapat respon. Peranan individu yang dapat menyelesaikan persoalan hidup menjadi amat terasa. Oleh karena itu mereka yang secara individu mempunyai nilai lebih di lingkungan masyarakat menjadi amat berpengaruh.

Oleh karena itu pembahasan pada bagian ini mendasarkan diri pada perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Kabaruan dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 2013. Tujuan utama daripada pembahasan pada bagian ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih baik mereka menggunakan hak pilihnya maupun tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Langkah identifikasi menjadi penting tatkala kita akan mengetahui secara mendetail terhadap segala sesuatu. Maka untuk

menjelaskan fenomena akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk digali, mengapa orang-orang secara tetap mendukung dan memilih kandidat tertentu, sekaligus berapa orang-orang secara tetap tidak mendukung bahkan tidak menggunakan hak pilihnya. Apakah faktor penggerak/pendorong yang mempengaruhi perbuatan keputusan individu tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dan harus diujikan supaya menggali pemahaman lebih lengkap dari perilaku pemilih dan proses politik di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ketergantungan pada mata pencaharian sebagai nelayan menunjukkan terbatasnya lapangan kerja yang membawa dampak bagi rendahnya daya beli masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Artinya daya serap sektor ini terhadap tenaga kerja dan pendapatan penduduk berpengaruh terhadap taraf kesejahteraan ekonomi.

Mereka tidak berangkat ke TPS karena pertimbangan tidak mendapatkan penghasilan. Karena sekali tidak mendapatkan penghasilan pada saat itu berarti berapa anggota keluarga yang menjadi tanggungan. sebagaimana yang dituturkan anggota masyarakat:

"Pada saat memberikan hak pilih saya ke TPS, saya berharap akan di berikan uang, dan jika tidak berikan uang saya tidak akan menggunakan hak pilih saya atau tidak akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)".

Pelajaran penting yang dapat digaris bawahi dari hasil wawancara di atas adalah karena kehidupan masyarakat tertopang pada pekerjaan untuk mencari kebutuhan hidup, maka bila mereka menggunakan hak pilihnya berarti tidak bekerja sekaligus tidak mendapat penghasilan untuk menutup kebutuhan hidup. Apalagi dalam hal penggunaan hak pilih tersebut tidak ada kompensasinya. Hal senada juga sempat dilontarkan salah satu masyarakat didesa Kabaruan, ketika menanggapi kecilnya masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya, berikut petikannya

"Yang jelas itu ada kekecewaan dari masyarakat namanya pemilihan bupati dikepulauan Talaud kebanyakan dari mereka mendapatkan uang untuk mengganti biaya dapur. Katakan seperti itu. Tapi karena kemarin itu tidak ada semacam itu jadi ada unsur kekecewaan dari mereka sehingga banyak yang tidak hadir pada waktu itu. Tidak menggunakan hak mereka, tidak menggunakan demokrasi mereka, padahal sebenarnya sangat penting, sangat penting sekali karena itu adalah nantinya bisa menentukan aspirasinya mereka, tapi mereka mungkin kurang memahami hal itu".

Bila di lihat lebih jauh dalam kehidupan masyarakat di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kabaruan tidak jauh berbeda, bahwa kompensasi material dalam penggunaan hak pilih sangat kental sekali. Mereka merasa dirugikan secara material bila waktu bekerja tidak menghasilkan. Mereka tidak mau tahu apakah hak mereka untuk memilih itu penting atau tidak.

Fakta lain terungkap dari hasil wawancara dengan anggota masyarakat yang lain, adalah sebagai berikut :

“saya memang dijanjikan oleh salah satu tim sukses dari pasangan calon, untuk mendapatkan hadiah kalau saya akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih pasangan dari mereka saya akan langsung mendapatkan uang.”

Demikianlah penuturan salah seorang tokoh masyarakat lokal yang sekaligus sebagai masyarakat yang ada di Kecamatan Kabaruan ketika menceritakan pandangan warganya tentang penggunaan hak pilihnya. Mereka datang meluangkan waktu menggunakan hak pilihnya ketika mendapatkan imbalan dan begitupun sebaliknya. Mereka tidak menggunakan hak pilihnya ketika mereka tidak mendapat imbalan materi, karena memang mereka dihadapkan oleh persoalan kebutuhan hidup.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota masyarakat, sebagai berikut :

“saya rakyat biasa saja, karena pemilihan hukum tua saja ada uangnya apalagi pemilihan bupati, kalau saya tidak mendapatkan uang saya tidak akan memilih”.

Memang faktor kompensasi material menentukan dalam perilaku pemilih, sebab rakyat kecil merasa bahwa ketika mereka datang ke TPS, berarti meninggalkan pekerjaan, yang berarti kalau tidak dapat kompensasi material (uang saku) berarti tidak dapat penghasilan, yang akibatnya mempengaruhi situasi keluarga yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Peneliti menemukan, seolah-olah sudah membudaya dalam setiap pemilihan, termasuk pemilihan Kepala Daerah, faktor uang dapat menentukan masyarakat desa menggunakan hak pilihnya atau tidak. Dalam pemilihan Kepala Daerah, mereka menunggu-nunggu barangkali sama dengan pada saat pemilihan Kepala Desa. Karena tidak ada uang transport, akhirnya mereka memutuskan tidak memilih.

Seorang ibu rumah tangga di Desa Kabaruan juga sebagai penjual minuman dan makanan menuturkan dalam bahasa yang sederhana, secara lengkap sebagai berikut ;

“Katanya akan mendapatkan uang saku, tetapi tidak dapat apa-apa, dibohongi, uang saku tidak ada, oleh sebab itu ada yang tidak memilih dan ada juga yang memilih”.

Ketergantungan masyarakat dalam menyempatkan waktu untuk menggunakan hak pilihnya sangat lekat sekali dengan adanya uang saku, ini semata karena kebutuhan mereka.

Dengan demikian pendapat tersebut di atas dapat dijadikan alasan pembenaran bahwa perilaku pemilih masyarakat menggunakan hak pilihnya dapat dilaksanakan bila ada imbalan kompensasi yang bersifat material.

Persoalan imbalan dalam hal pilih memilih ini sangat rasional. Mereka datang ke TPS meninggalkan pekerjaan, yang jelas tidak mendapatkan hasil untuk keluarga. Para pemilih mempunyai kalkulasi untung dan rugi. Maka benar adanya bahwa pendekatan rasional dalam perilaku pemilih dalam teori seperti dalam uraian terdahulu dapat diakui kebenarannya.

Kepemimpinan dan Ketokohan

Keberadaan para pemimpin cukup mempunyai arti dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih. Pemimpin karena ketokohnya juga sebagai “*key person*” dalam masyarakat. Pemimpin dapat resmi maupun pemimpin tidak resmi, Adman Nursal menyatakan bahwa :

“Pemimpin dapat dibedakan menjadi pemimpin resmi seperti Ketua RT, Kepala Kelurahan, Bupati kepulauan Talaud, Gubernur, dan sebagainya. Selain itu terdapat pemimpin informal yang sering juga disebut sebagai tokoh masyarakat seperti Pendeta dan sebagainya. Adakalanya pemimpin resmi dan pemimpin informal melekat pada satu figur, misalnya seorang tokoh agama yang juga menjabat Kepala Desa. Kepemimpinan resmi selalu harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi sehingga daya cakupnya agak terbatas. Sedangkan ruang lingkup kepemimpinan informal tidak memiliki batas resmi kecuali pengakuan dan kepercayaan masyarakat, baik pemimpin resmi maupun pemimpin informal memiliki kekuatan yang dapat mengerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu termasuk mempengaruhi perilaku pemilih”

Pada penelitian tentang perilaku pemilih di Kecamatan Kabaruan pemimpin formal seperti Kepala Desa, para perangkat Desa memberi pengaruh terhadap perilaku para pemilih. Masyarakat yang dekat dengan Kepala Desa cenderung mengikuti pola Kepala Desa, seperti yang terjadi di Desa Kecamatan Kabaruan, sebagaimana yang dinyatakan Kepala Desa Kecamatan Kabaruan :

“Saya dan rekan-rekan perangkat desa bersama-sama mengajak masyarakat untuk memberikan hak-hak politiknya dan datang ke TPS untuk memilih calon yang disukai”.

Demikian juga masyarakat yang punya ikatan kuat pada pemerintah desa atau pendeta mereka akan berpengaruh pada perilaku pemilih, karena mereka menganggap bahwa para tokoh-tokoh ini menjadi penopang dalam menyelesaikan segala persoalan hidup mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu warga Desa Kecamatan Kabaruan, yang menyatakan secara polos, sebagai berikut :

“memang saya mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh kepala desa sebab beliau sering membantu saya dalam berbagai persoalan hidup”.

Masyarakat yang ada di kecamatan Kabaruan cenderung berorientasi *paternalistic* dan kurang mandiri dalam menentukan semua keputusan yang hendak diambil. Para pemilih masih memandang para pemimpin sebagai figur yang harus dipatuhi dan dipanuti segala tindakan dan perilakunya. Sosok-sosok pemimpin desa lainnya mempunyai pengaruh perilaku warga desa. Pernyataan salah seorang nelayan menyatakan :

“Pilkada sebelumnya saya memilih bapak Elie Lasut karena saya suka dengan Golkar, tapi sekarang saya tidak memilih calon dari Golkar karena saya mengikuti apa yang disampaikan oleh kepala desa”.

Keputusan warga untuk memilih partai politik juga masih tergantung pada siapa yang mengarahkan, jadi nampaknya tidak menetap sebagaimana

pernyataan warga tersebut. Hal ini juga diperkuat pernyataan Kepala Desa Kabaruan sebagai berikut :

“jadi untuk di Desa Kabaruan mayoritas peta politiknya berubah ubah. Jadi mulai sejak dulu PDIP yang banyak di pilih, namun walaupun demikian tergantung dari yang membawa, yang mengarahkan ini kalau pandai-pandai untuk mengambil hati rakyat saya kira bias untuk diarahkan kemana tujuan dari pada yang membawa tersebut. Suatu contoh tahun 1992 walaupun basisnya Kabaruan itu PDIP namun dapat dimenangkan Golkar untuk tahun 1999”

Dengan adanya uraian tersebut maka pemimpin dan ketokohan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perilaku pemilih di Desa Kabaruan dan Desa Kecamatan Kabaruan.

Orientasi Kandidat

Para kandidat Bupati kepulauan Talaud dan Wakil Bupati kepulauan Talaud dapat mempengaruhi perilaku pemilih di Desa yang ada di Kecamatan Kabaruan. Karena salah satu Kandidat berasal dari Desa Kordakel kecamatan Kabaruan sehingga, mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan hak pilih.

Masyarakat Kabaruan terpengaruh calon dari desanya yang diakomodir sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku pemilih, mereka kebanyakan dengan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih karena terdorong ada figur yang mereka kenal, penyampaian salah seorang warga di TPS tersebut :

“Sebelumnya saya tidak memilih karena figur dari kecamatan lain, karena ini figur dari desa saya sendiri jadi saya memilih”.

Umumnya masyarakat sekitar bersatu untuk memberikan dukungan terhadap calon yang berasal dari daerah mereka. Persoalan kandidat punya pengaruh besar pada perilaku pemilih, mereka bersedia menggunakan hak pilih, jika kandidat yang ada sesuai dengan aspirasi mereka. Jika tidak lebih baik mereka tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut sesuai dengan penuturan seorang warga Desa Kabaruan, sebagai berikut:

“kalau dilihat dari gejolak yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud memang masyarakat Kecamatan Kabaruan ada yang tidak memilih alias golput, masalah kalau tidak mencoblos itu ada kandidat dari kecamatan Kabaruan yang maju walaupun hanya sebagai pendamping atau calon wakil bupati”.

Kandidat dari desa tersebut sangat dibanggakan masyarakat, mereka merasa bangga bila dari desanya ada yang terwakili menjadi pemimpin walaupun hanya wakil bupati kepulauan Talaud. Mereka merasa senang, yang pada hakekatnya menggunakan hak pilihnya, berkaitan dengan kandidat dari desa tersebut sebagai calon wakil bupati, yang akhirnya berdampak memilih, seperti yang dituturkan seorang warga sebagai ibu rumah tangga sebagai berikut :

“saya sangat senang dan bahagia untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena calon yang saya akan pilih adalah orang yang saya kenal dari daerah kami”.

Berdasarkan beberapa pendapat masyarakat tersebut tentang kandidat maka masyarakat yang ada di kecamatan Kabaruan telah masuk dalam kondisi Konsep *positioning* yang bertitik tolak pada kepentingan komunikasi. Kandidat dari Desa Kabaruan yang telah dikenal karena memang asli putra daerah tersebut telah merebut *positioning* dan *political marketing*.

“Menurut Renald Kasali (1996) *positioning* adalah mencari jendela dalam otak konsumen, dan untuk *political marketing* adalah mencari jendela pemilih, *positioning* berhubungan dengan bagaimana para pemilih menempatkan tawaran politik dalam otaknya, khayalannya sehingga calon pemilih mempunyai penilaian tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan produk politik tertentu.”

Akibat dari kondisi masyarakat, dapat dikategorikan dalam *positioning* dan *political marketing* yang dialami pada masyarakat Kabaruan tentang calon kandidat karena calon kandidat sudah bersarang dibenak otaknya, maka kalau calon dari desanya tidak masuk dalam kandidat, lebih baik mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut sudah jelas bahwa masyarakat Kecamatan Kabaruan yang fanatik terhadap calonnya sudah masuk pada hasil proses *positioning* dan *political marketing*, kita akan jelas lagi bila mencermati cuplikan pendapat seorang tokoh pemuda di Desa Kabaruan, sebagai berikut :

“pertama saya sebagai masyarakat sangat setuju dengan tampilnya tokoh dari kecamatan Kabaruan untuk tampil sebagai calon pemimpin walupun hanya calon bupati, tapi saya pribadi mendukung keberanian beliau untuk bisa mewakili daerah kami menjadi pemimpin”.

Proses *positioning* yang dialami pada masyarakat Kabaruan tersebut berkaitan dengan cara manusia menyimpan informasi untuk membentuk persepsi yang selanjutnya dapat disebut makna politik.

Dengan uraian di atas, maka dapat terbukti/teruji bahwa figur kandidat mempunyai pengaruh yang kuat dalam penggunaan hak pilih dalam pilkada. Dengan demikian, maka benar/terbukti hipotesis bahwa figur pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Talaud sangat berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih pada pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya di Desa-desa yang ada di Kecamatan Kabaruan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talaud tahun 2013 di pengaruhi oleh calon yang berasal dari daerah Talaud atau Putra Daerah sendiri dan politik uang, sehingga banyak anggota pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya jika tidak di berikan uang. Dan kurangnya sosialisasi politik sehingga

masyarakat (pemilih) kurang memahami bahwa pemilihlah yang menentukan pemimpin untuk daerahnya.

Saran

Lebih di tingkatkan lagi sosialisasi politik kepada masyarakat (pemilih), supaya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi ada politik uang, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih, karena pemilihlah yang menentukan pemimpin untuk daerahnya.

DAFTAR BACAAN

- Arikunto, Suharsimi, 1992 *Prosedur Penelitian*, Jakarta Reneka Cipta.
- Agustino, Leo, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayan Obor Indonesia, Jakarta
- David Moon, 1992, *The determinants of turn out in presidential elections: an integrative model accounting for information, in the Political Behaviour*, Vol. 14.No.2.
- Dennis Kavanagh: 1983, *Political science and political behavior*, London university press,.
- Gaffar, Affan, 1992. *Javanese Voters: a case study of election under hegemony party system*; (disertasi, the ohio state university, 1988) Gama Press, Yogyakarta.
- Gaffar, Afan, 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Gregorius Sahdan, 2003 *"Pembangunan Partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilu 2004: studi perbandingan UU Pemilu 1999 dan UU Pemilu 2004, suatu evaluasi*, CSIS, Jakarta.
- Gabriel A. Almond, Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik "Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Huntington, Nelson, 1994, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta Rineka Cipta
- Ign, Ismanto, *Pemilihan Presiden secara Langsung 2004, Dokumentasi, Analisis dan Kritik*, Yogyakarta, Galang 2004.
- Koentjaraningrat, 1991, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia.
- Lisa Harison, 2007, *Metode Penelitian Politik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Maleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* : PT Remaja Rosdakarya.
- Martin Harrop and William L. Miller, 1987, *Elections and Voters a comparative introduction*, MacMillan Press,
- Nursal, Adman, 2004. *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : Gramedia.

- Prihatmoko, Joko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Reynolds, Andrew and Ben Reilly. 1997. *Electoral System Design*. Stockholm, International IDEA.
- Richard R. Lau, David. Redlawsk, 2006, , *How Voters Decide "Information Processing during Election Campaings*, Cambridge University Press
- Saifudin Aswar, 1998, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, edisi kedua, pustaka pelajar, Yogyakarta
- Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Singarimbun, Sofian, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Pustaka LP3S
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Pemilihan Pada Pemilu 1992: antara kendala dan peluang*, *Makalah Seminar Nasional IX AIPI 6-8 Agustus*, FISIP UNAIR, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.
- Tanjung, Bahdin Nur, 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Tesis)*. Jakarta : Kencana Predana.
- Vredenberg, J., 1985. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia